

ANALISIS INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017-2021 STUDI KASUS: KEMENTERIAN/LEMBAGA AGRARIA TATA RUANG-BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA

M. Komara Novianto, Ari Setiawan, Satria Tesapati,
Elinda Pramitasari, Sasmita Restu Hutami
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Abstract

The use of Budget Implementation Performance Indicators (IKPA) as a measuring tool for budget implementation serves as a description of the work unit performance obtained from the suitability of budget planning and implementation, effectiveness of activity implementation, compliance with regulations and efficiency of budget implementation. This paper aims to measure the suitability of Ministry Of Agricultural Institutions And Spatial Management Of The National Land Agency spending in the scope of North Maluku Province compared to the 13 indicators contained in the IKPA in order to obtain whether the use of the budget at the Ministry/Institution has been functioning optimally. This study uses a quantitative descriptive method to see the description of Ministry/Institution spending. The results showed that there were still indicators that were still below 99 percent, namely. Based on the results of this study, it is hoped that the indicators that are still not optimal, there is room for improvement in the performance of the relevant Ministry/Institution budget and used to analyze the low IKPA needs according to the characteristics of each Ministry/Institution.

Abstrak

Penggunaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat ukur atas pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai gambaran kinerja satker yang diperoleh dari kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Tulisan ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian atas belanja K/L ATR-BPN di Lingkup Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan 13 indikator yang terdapat dalam IKPA agar diperoleh apakah penggunaan anggaran pada K/L telah berfungsi dengan maksimal. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk melihat gambaran atas belanja K/L. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat indikator yang masih berada dibawah 99 persen yaitu. Atas hasil penelitian tersebut diharapkan indikator yang masih belum maksimal terdapat ruang untuk dilakukan peningkatan atas kinerja anggaran K/L

bersangkutan dan digunakan untuk menganalisis Kebutuhan IKPA rendah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing K/L.

Keywords: IKPA, Maluku Utara, pelaksanaan anggaran

JEL Classification: H5

PENDAHULUAN

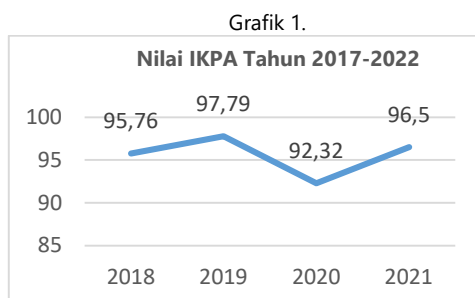
Belanja pemerintah digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian yang ada di dalam masyarakat. Belanja pemerintah yang digunakan secara langsung maupun secara tidak langsung dapat memicu juga pertumbuhan pada *private sector*. Peran pemerintah di dalam pertumbuhan ekonomi termasuk kedalam pertumbuhan endogen, terutama dalam pertumbuhan yang terdapat dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan (Brons, de Groot, Nijkamp, 1999) bahwasanya pemerintah dapat berpengaruh baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui beberapa faktor yang terdapat dalam *endogenous growth models* diantaranya dapat berasal dari belanja pemerintah baik itu belanja modal untuk infrastruktur maupun belanja untuk peningkatan sumber daya manusia.

Belanja pemerintah yang baik seharusnya dapat tercapai baik secara output maupun secara outcome. Untuk mengukur ketercapaian belanja pemerintah itu maka diperlukan pengukuran berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. IKPA berfungsi untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dari keempat variabel yang ada dalam IKPA dibagi-bagi lagi kedalam 13 indikator untuk lebih dalam mengukur ketercapaian dari masing-masing variabel diantaranya yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus,

Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, Retur SP2D, Perencanaan kas, dan Kesalahan SPM.

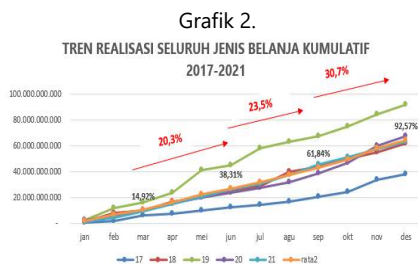
IKPA sendiri telah berjalan dari tahun 2015 (Dit. PA, 2022) berawal dari 7 indikator saja yang digunakan untuk dilakukan penilaian berkembang hingga menjadi 13 indikator di tahun 2021. Dari tahun ke tahun tingkat IKPA hampir semua K/L yang ada di provinsi Maluku Utara secara umum naik. Namun demikian masih terdapat ruang yang dapat dikembangkan lagi untuk memaksimalkan belanja yang dapat dilakukan oleh masing-masing K/L tersebut.



Sumber: OM-SPAN, diolah (data 2017 tidak ditemukan)

Kementerian / Lembaga Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (K/L ATR/BPN) termasuk kedalam 15 K/L terbesar yang ada di lingkup Provinsi Maluku Utara. Terdiri dari 10 satker dengan 1 Kantor Wilayah dan 9 kantor unit vertikal yang berada di bawahnya. Untuk pagu di tahun anggaran 2022 terdapat Rp 70,81 M dengan pembagian Belanja Pegawai Rp 17,69 M (24,96%), Belanja Barang Rp 40,93 M (57,81%) dan Belanja Modal Rp 12,2 M (17,22%).

Secara umum, tren belanja K/L ATR BPN masih terjadi penumpukan pada triwulan 1 dan 2 dimana hal itu dapat mengakibatkan terjadi penumpukan pada periode berikutnya yaitu triwulan 3 dan 4.



Sumber: Aplikasi Mebe, diolah

Dengan tingkat penyerapan rata-rata yang telah berjalan selama 5 tahun tersebut, seharusnya dengan adanya IKPA yang telah berjalan selama ± 7 tahun atau mengarah melalui tingkat perencanaan dan penyerapan yang sudah lebih baik. Oleh karenanya dalam tulisan ini akan mengangkat permasalahan mendasar yang dimiliki oleh spesifik K/L ATR-BPN supaya dapat menambah nilai IKPA K/L bersangkutan di TA 2022.

TINJAUAN LITERATUR

Kinerja Anggaran

Sesuai dengan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwasanya keuangan negara harus dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara negara termasuk Kementerian / Lembaga sebagai pelaksana anggaran pemerintah pusat. Dalam proses pengelolaan anggaran tersebut seharusnya dapat diukur melalui suatu sistem yang telah tertata

dan memiliki standar pengukuran yang dapat diketahui penilaiannya.

Definisi kinerja itu sendiri dapat berasal dari sistem maupun ukuran yang diselenggarakan dan disepakati untuk menjadi standar yang bersifat umum. Pengukuran kinerja dapat berupa sebuah sistem yang memiliki tujuan supaya membantu pimpinan atau manajer sebuah organisasi untuk menilai pencapaian apakah suatu strategi itu berhasil atau tidak melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. (Mahsun, 2016).

Kinerjamengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. Kinerja dapat juga didefinisikan sebagai suatu struktur yang bersifat multidimensional dan juga pengukurannya dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas atas faktor-faktor yang dapat membentuk kinerja (Otley-1999 dalam Mahmudi,2005)

Pendapat lain diutarakan oleh Darise (2007), indikator kinerja merupakan sebuah ukuran baik bersifat kuantitatif dan atau bersifat kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran kegiatan ataupun tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria sebuah indikator dan sasaran kinerja menurut Darise (2007) adalah: (1) spesifik dan jelas, supaya tidak terdapat kemungkinan perbedaan tafsiran, (2) pengukurannya bersifat secara objektif, (3) termasuk dapat menangani aspek-aspek objektif yang relevan dengan obyek pengukuran, (4) dapat bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan suatu program kegiatan,

keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, (5) dapat menunjukkan gambaran terhadap perubahan (6) bisa diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan (7) data tersebut dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Sebagai sebuah subjek, kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of work*), hal ini dikarenakan hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi (Roger-1994) dalam Mahmudi, 2005).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dapat berupa sebuah sistem baik itu bersifat kuantitatif maupun kualitatif serta hasil dari data kinerja anggaran tersebut dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya dengan menggunakan metode yang telah dipilih.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan sebuah tahapan atas pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah kegiatan perencanaan anggaran selesai disusun. Pelaksanaan merupakan sebuah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses atas pelaksanaan anggaran dapat meliputi pengaturan terhadap penggunaan instrumen-instrumen yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Proses

pelaksanaan anggaran tersebut identik dengan proses pembayaran dibandingkan dengan kesesuaian atas beban pada APBN, sehingga tertib administrasi menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP,2011). Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang di perlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk bagaimana sesegera mungkin untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah disusun. Pelaksanaan anggaran merupakan siklus lanjutan yang harus dilakukan sehingga siklus APBN dapat terus berjalan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No.21 Tahun merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran,

efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengukuran IKPA itu sendiri terdiri dari 4 aspek dan 13 indikator yang dapat dijelaskan antara lain:

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran; terdiri dari:

- Revisi DIPA,
- Deviasi Halaman III DIPA,
- Pagu Minus.

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, terdiri dari:

- Penyampaian Data Kontrak,
- Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP),
- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara,
- Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM).

3. Efektivitas pelaksanaan anggaran; terdiri dari:

- Penyerapan Anggaran,
- Penyelesaian Tagihan,
- Capaian Output,
- Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

4. Efisiensi pelaksanaan anggaran. Terdiri dari:

- Pengembalian/Kesalahan SPM,
- Perencanaan Kas (Renkas).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang meneliti tentang IKPA diantaranya:

1. Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran menggunakan IKPA oleh Sodikin (2021).

Dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode survei

terhadap 28 responden tersebut, variabel yang diteliti adalah 2 indikator dalam IKPA yaitu variabel kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran dan variabel efektivitas pelaksanaan anggaran.

Hasil yang diperoleh menyatakan kedua indikator tersebut sesuai dan relevan dengan kegiatan yang dilakukan oleh satker, namun keterbatasan yang dialami oleh peneliti terdapat pada belum adanya perbandingan data primer dari responden dengan data penilaian IKPA yang dimiliki oleh satker.

2. Pengaruh Kepatuhan Satker Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran Binopslat (Buana., et al, 2019).

Penelitian dengan menggunakan metode campuran kuantitatif-kualitatif ini menguji kepatuhan antara pengelolaan anggaran internal satker dengan indikator dalam IKPA.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara kepatuhan penyusunan pertanggungjawaban keuangan, penyaluran dukungan anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan terhadap penyaluran dukungan anggaran Binopslat Sopsal.

Perbedaan atas penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada obyek penelitian, dimana penelitian terdahulu meneliti pengaruh IKPA pada subyek satker, sedangkan penelitian ini meneliti hasil IKPA yang telah dilakukan oleh subyek satker.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengolahan data yang dilakukan atas Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017-2021. Studi Kasus: Kementerian / Lembaga ATR-BPN Provinsi Maluku Utara dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.

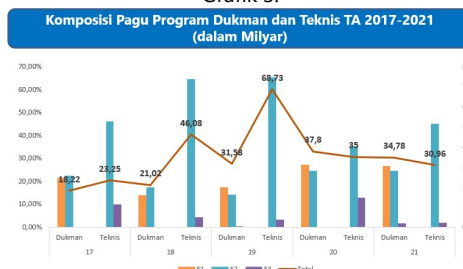
Data diperoleh dari data sekunder yang berasal dari Aplikasi OM-SPAN, MEBE maupun data sekunder lain untuk menunjang data yang diperlukan baik itu dari CW-SPAN, dan Nadine .

Data yang ditampilkan berupa Pagu K/L ATR-BPN sesuai dengan Program, Realisasi berdasarkan Jenis Belanja, maupun data dukung berupa rincian masing-masing Indikator pembentuk IKPA. Data disajikan baik dalam bentuk table maupun grafik. Ruang lingkup data dipilih berdasarkan Tahun Anggaran 2017 s.d 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Total Pagu anggaran yang dimiliki oleh K/L ATR-BPN Lingkup Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu TA 2017-2021 sebesar Rp 347.471.232.000 dengan realisasi sebesar Rp 321.638.378.841 atau sebanyak 92,56%.

Grafik 3.



Sumber: Aplikasi Mebe, diolah

Dari kurun waktu TA 2017-2021 terlihat bahwa Program Dukungan Manajemen bila dibandingkan dengan Program Teknis yang ada di lingkup K/L ATR-BPN berbanding antara Program Dukman (41,28%) dengan Program Teknis (58,72%).

Tabel 1. Komposisi Pagu Program Dukman & Teknis TA 2017-2021 K/L ATR-BPN

Program	Dukman	Teknis
2017	18.224.188.000	23.250.352.000
2018	21.029.504.000	46.088.612.000
2019	31.589.544.000	68.734.630.000
2020	37.801.182.000	35.001.585.000
2021	34.784.118.000	30.967.517.000
Total	143.428.536.000	204.042.696.000

Alokasi belanja tertinggi terdapat pada tahun 2019 dimana alokasi program teknis sebesar 33,68% dari keseluruhan selama 5 tahun.

Sebelum masuk ke dalam analisis deskriptif per-indikator dalam IKPA, diketahui bagaimana gambaran belanja secara kumulatif selama 5 tahun terakhir dari grafik 2 yang telah dipaparkan dimuka. Dari data awal tersebut didapatkan rata-rata peningkatan

belanja per-triwulan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. Kenaikan rata-rata belanja per-triwulan periode 2017-2021

Triwulan	Realisasi (%)	Kenaikan (%)
I	14,92	-
II	38,31	23,39
III	61,84	23,53
IV	92,57	30,73

Sekilas dapat diketahui realisasi penyerapan pada TW-1 & 2 bila dibandingkan kesesuaian dengan Target Penyerapan anggaran sesuai dengan Per-4/PB/2021 yang mengatur tentang IKPA masih terdapat triwulan yang lebih rendah dari target. Dari target sesuai ketentuan, penyerapan per-triwulan seharusnya berturut-turut berada di angka 15% - 40% - 60% - 90%. Bila melihat data tersebut secara rata-rata yang tidak sesuai dengan target berada di Triwulan-2.

Realisasi secara jenis belanja baik itu 51 (Belanja Pegawai); 52 (Belanja Barang) dan 53 (Belanja Modal), secara rata-rata lonjakan terjadi pada belanja 52 (31,3%) dan belanja 53 (44,7%) terutama pada triwulan 3 dan 4.

Dari belanja secara keseluruhan tersebut terdapat belanja yang masih berada di bawah 80% yaitu Belanja Jasa-5221 (80,30%), Belanja Barang Operasional-5211 (83,10%), dan Belanja Lembur-5122 (87,86%).

IKPA Berdasarkan Indikator

Tabel 3. Profil Nilai IKPA Lingkup K/L ATR- BPN TA 2017-2020

Aspek IKPA	Indikator	2018	2019	2020	2021
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	100	100	100	100
	Deviasi Halaman III DIPA	91,68	70,31	59,09	74,68
	Pagu Minus	99,97	80	100	99,99
	Data Kontrak	99,87	100	100	100
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Pengelolaan UP dan TUP	72,5	99,37	99,44	100
	LPJ Bendahara	94	100	100	100
	Dispensasi SPM	100	100	100	100
	Penyerapan Anggaran	94,69	97,32	87,38	92,80
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyelesaian Tagihan	99,78	100	96,87	92,84
	Konfirmasi Capaian Output	0	0	100	97,50
	Retur SP2D	99,64	99,71	99,89	99,90
	Renkas	0	0	0	0
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Kesalahan SPM	97,40	93,75	97,22	96,66
Nilai IKPA		95,41	94,59	94,99	96,20

Sumber: Aplikasi OM-SPAN, diolah

1. Indikator Penyampaian Data Kontrak

Berdasarkan tren dari 2018 s.d 2021 pengiriman data kontrak masih termasuk tinggi dengan raihan hampir tiap tahunnya sebesar 100.

Penerbitan kontrak telah dilakukan di awal tahun dengan pembagian nilai >Rp 200 juta paling banyak berturut-turut dilakukan pada bulan Maret & Agustus dan pembagian nilai <Rp 200 juta paling banyak berturut-turut dilakukan pada bulan Maret & April

2. Indikator Deviasi Halaman III DIPA

Tren pada indikator ini menurun, pada 2018 sebenarnya memperoleh nilai yang cukup tinggi namun menurun pada 2019 untuk kemudian mulai naik lagi pada 2021.

Tren pada setiap tahunnya memiliki deviasi yang tinggi pada triwulan-4 dimana terjadi gap negatif dikarenakan perencanaan lebih tinggi daripada realisasi

3. Indikator Pengelolaan UP & TUP
Pengelolaan secara umum tinggi dimana perolehan pada tahun 2021 mencapai nilai 100. Mayoritas peningkatan permintaan TUP tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Desember. Sedangkan secara nominal permintaan UP tertinggi pada bulan Oktober.

4. Indikator Revisi DIPA

Nilai revisi DIPA secara umum sudah tinggi dimana setiap tahunnya mencapai nilai 100. Secara tren, permintaan revisi DIPA pada tahun 2021 paling banyak terjadi berturut-turut pada bulan November, Oktober dan April. Hal ini menunjukkan satker K/L ATR-BPN telah memaksimalkan batas penyesuaian revisi sekaligus penyesuaian Hal-3 DIPA pada 10 hari kerja pertama pada setiap triwulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum nilai indikator IKPA yang diperoleh terdapat nilai yang rendah pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA.

Walaupun begitu bila ditelisik lebih dalam pada masing-masing indikator, sebenarnya terdapat ruang untuk perbaikan pada masing-masing indikator.

Pada indikator data kontrak secara umum sudah bagus, namun apabila disesuaikan dengan realisasi secara tren dapat lebih dimaksimalkan lagi untuk pencairan data kontrak di TW-2 dikarenakan realisasi di triwulan tersebut masih dibawah target penyerapan anggaran sebesar 40%.

Indikator deviasi halaman 3 DIPA mempunyai nilai indikator terendah (karena nilainya masih <90). Hal ini dapat dimaksimalkan sekaligus dengan sinergi pada indikator Revisi DIPA yang sudah tinggi. Harapannya revisi DIPA sudah memaksimalkan perencanaan pada Hal-3 DIPA.

Indikator Pengelolaan UP & TUP sudah maksimal dimana TUP yang dimintakan telah dapat digunakan dengan baik.

Perbaikan untuk K/L ATR-BPN Prov. Maluku Utara dapat ditingkatkan lagi dengan lebih memaksimalkan lagi realisasi anggaran yang telah direncanakan pada revisi hal-3 DIPA sehingga tidak terjadi gap negative dimana realisasi < rencana.

Nilai IKPA pada K/L dapat lebih ditingkatkan lagi apabila dilakukan konfirmasi atas penyebab rendahnya nilai IKPA untuk kemudian dicari solusi atas masalah yang terjadi.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Atas penelitian ini diharapkan kinerja K/L ATR-BPN dapat lebih meningkat lagi dimana sisi yang masih dapat ditingkatkan lagi terdapat pada indikator IKPA yang telah dibahas, yaitu peningkatan pada indikator deviasi Hal-3 DIPA.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum terkonfirmasinya indikator IKPA yang rendah pada K/L karena obyek penelitian sebatas pada hasil penilaian IKPA yang telah dihasilkan.

Hasil penilaian pada K/L lain dapat berbeda dikarenakan karakteristik pelaksanaan anggaran masing-masing

yang berbeda sehingga indikator yang rendah dimungkinkan berbeda.

REFERENSI

Brons, M.,H.L.F. de Groot & P. Nijkamp (1999), "Growth Effect of Fiscal Policies," Timbergen Discussion Paper, Amsterdam, Vrije Universiteit.

Buana, L. C., & Widiatmoko, N. (2019). Pengaruh Kepatuhan Satker pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran Binoplat. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana.

Darise, N. (2007). Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Gorontalo: Indeks.

Ditjen Perbendaharaan. Perdirjen No.4/PB.4/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian. Jakarta

Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Sodikin, S. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan IKPA. JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion.